

AKUNTABILITAS DALAM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN DI INDONESIA

Ahmad Baehaqi¹, Nida Faradila², Lutfi Zulkarnain³ (*)

¹Program Studi Akuntansi Syariah, STEI SEBI, Depok

²Program Studi Akuntansi Syariah, STEI SEBI, Depok

³Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, STEI SEBI dan Pondok Pesantren Daar el-Mansur, Depok

Abstract

This The purpose of this study is to analyze the implementation of accountability in accounting and financial reporting implemented by the Darunnajah Islamic Boarding School (PPDN). This study uses descriptive qualitative with a case study approach giving semi-structured interviews to key informants, observation and inquiry of supporting documents/evidence. Besides the interviews, this study also uses secondary data obtained from literature studies. The study indicates that the implementation of accountability in PPDN accounting and financial reporting have been running quite well, but still needs improvement. The finance department at PPDN does not have an accounting/finance background and is in charge of recording cash/bank transfers through the Darunnajah Smart System and B-Ware application systems. The financial statements are prepared by PPDN internal auditors with accounting backgrounds with reference to PSAK 45.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pondok Pesantren

Informasi Artikel:

Dikirim: 07 Februari 2021

Ditelaah: 24 Maret 2021

Diterima: 09 April 2021

Publikasi daring [online]: Juni 2021

Januari – Juni 2021, Vol 10 (1): hlm 44-53

©2020 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(*) Korespondensi: baehaqi17@gmail.com (A. Baehaqi)

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, organisasi juga terus mengalami perkembangan, termasuk organisasi nirlaba. Pada umumnya, organisasi tersebut menekankan pada kegiatan pelayanan kepada pihak eksternal, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial. Salah satu organisasi nirlaba yang berfokus pada pelayanan pendidikan dengan jumlah yang cukup banyak adalah pondok pesantren (selanjutnya disebut Pesantren) (Yanuar, 2018). Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Dalam proses transmisinya, semua komponen termasuk kiyai (pimpinan), santri dan murid maupun kurikulum harus terlibat secara sinergis. Semua komponen tersebut harus berjalan secara beriringan dalam mewujudkan tujuan suatu lembaga (Depag, 2013).

Meskipun perkembangan pesantren masih relatif sederhana, tetapi pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bergengsi. Kehadiran pesantren di tengah masyarakat sangat membawa pengaruh yang luar biasa bagi pembinaan moral dan pengembangan pendidikan. Lembaga pendidikan pesantren telah lama bertahan dan tetap eksis sampai saat ini, kemampuan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan telah diakui sebagai bagian lembaga pendidikan nasional (Maesaroh & Achdiani, 2018). Saat ini, jumlah pesantren yang berdiri adalah 28.194 yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini membuktikan bahwa pesantren banyak diminati oleh masyarakat untuk keberlangsungan berjalannya pendidikan yang baik (Kemenag, 2019).

Terdapat beberapa peran dalam sistem penyelenggaraan pesantren yaitu, manajemen sebagai faktor upaya, organisasi sebagai faktor sarana dan administrasi sebagai faktor karsa. Ketiga faktor tersebut memberi arah dan perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan, penyelenggaraan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pondok pesantren (Maesaroh & Achdiani, 2018).

Sumber daya pesantren adalah salah satu bagian yang menjadi faktor penentu perkembangan pondok pesantren. Sumber daya pesantren terdiri dari tiga unsur, yaitu *human resources*, *finance*, dan *facilities*. Ketiga sumber daya itu, menjadi core kehidupan perjalanan pesantren (Yanuar, 2018). Adapun jenis sumber daya atau aset kepemilikan yang dikelola oleh pondok pesantren seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain, bersumber dari bantuan, SPP, dari unit usaha yang dimiliki dan mayoritas berasal dari wakaf. Wakaf mempunyai peran penting dalam pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di pesantren.

Oleh karena itu, pesantren harus memiliki sistem akuntansi atau laporan keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang handal, maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan yayasan yang bersangkutan. Sebagai suatu entitas non-laba, pelaporan aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan (Dwi, 2020; Rahmidi, 2011).

Pondok pesantren di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada

prioritas kualitas program, dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang andal dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup. Beberapa masalah yang dihadapi pesantren disebabkan keterbatasan kemampuan pengelolanya, keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang manajemen maupun keuangan (Murdayanti & Puruwita, 2017).

Pondok pesantren Darunnajah (PPDN) merupakan salah satu pesantren besar di Jakarta yang berdiri pada tahun 1974. Sampai saat ini, Pesantren terus berkembang dan telah mendirikan 17 cabang Darunnajah yang tersebar di seluruh Indonesia. PPDN terus berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, pembangunan fisik, pengembangan dana dan mempersiapkan para kader untuk kemajuan jangka panjang lembaga pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga memiliki misi dan cita-cita yang sangat besar untuk memancarkan pancuran kesejukan ke penjuru-penjuru yang memerlukan, yaitu dengan membangun seratus pondok pesantren (Harits, 2014).

PPDN mengambil peran penting dalam lembaga pendidikan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat, PPDN memiliki dan mengelola dana pendidikan yang cukup besar. Dana pendidikan tersebut sudah seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik serta alokasi dana untuk pendidikan. Demikian pula, semua pengeluaran keuangan pesantren yang diperoleh dari berbagai sumber harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menjadi bentuk transparansi manajemen keuangan. Pada prinsipnya, akuntabilitas dilakukan dengan mengikuti aturan sumber daya anggaran. Namun, prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam akuntabilitas keuangan di pesantren masih harus ditegakkan (Subkhan, 2012).

Penelitian berkaitan dengan akuntabilitas pesantren telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya, Basri, Siti Nabihah, & Majid (2016) melakukan penelitian terkait akuntansi dan akuntabilitas pesantren di Aceh. Rusdiyanto (2016) dan Atufah, Yuliarti, & Puspitasari (2018) meneliti penerapan PSAK 45 di pesantren. Murdayanti & Puruwita (2017) meneliti transparansi dan akuntabilitas dari manajemen keuangan pesantren, Wahyuningsih, Karamoy, & Afandy (2018) meneliti pelaporan keuangan pesantren di Mando, Zulkifli, Wardoyo, & Andayani (2018) meneliti akuntabilitas manajemen keuangan, dan Murdayanti & Puruwita (2019) yang meneliti kompetensi SDM dan akuntabilitas pesantren. Namun demikian, analisis akuntabilitas yang ditekankan pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan, penggunaan triangulasi data, wawancara terhadap informan kunci di luar pesantren belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk melengkapi kesenjangan tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh PPDN. PPDN memiliki 16

cabang yang tersebar di berbagai daerah. Penelitian ini membatasi pencarian informasi dan penelitian pada 3 lokasi PPDN, yaitu PPDN 1 Jakarta, PPDN 8 Cidokom dan PPDN 9 Pamulang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman yang mengeksplorasi masalah sosial. Peneliti membangun sebuah deskripsi, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan terperinci dari informasi yang didapat dan melakukan penelitian secara alami (Creswell, 2016). Studi kasus dimaksudkan untuk menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi yang diteliti (Beni & Yana, 2018), dalam hal ini adalah pelaksanaan akuntabilitas di PPDN.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Sumber data primer diperoleh dari wawancara semi terstruktur, observasi dan permintaan dokumen/bukti pendukung. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 orang pimpinan pesantren, 3 orang kabag keuangan, 1 orang internal audit dan 2 orang walisantri sebagai tambahan *stakeholder* PPDN.

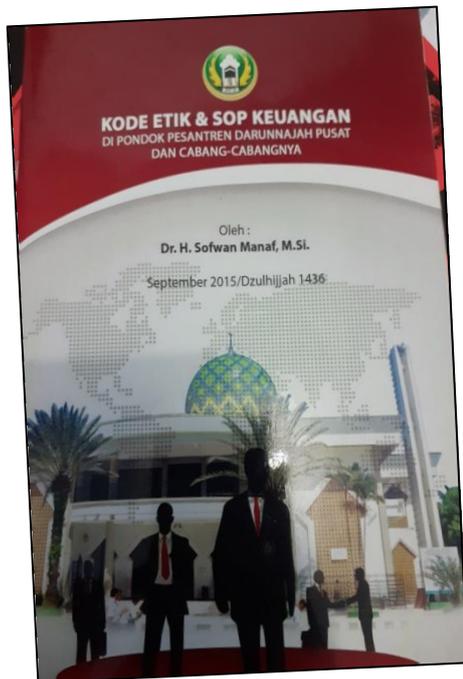
Selain data primer, penelitian ini juga dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis dengan analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan secara mendalam pelaksanaan akuntabilitas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan PPDN, yang berfokus pada administrasi dan manajemen, akuntansi dan pelaporan keuangan, akuntabilitas dan rasio penyaluran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi dan Manajemen Keuangan

PPDN merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Darunnajah. Selain sebagai lembaga pendidikan, PPDN masih juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiar agama yang merupakan ciri khas pesantren. Salah satu komponen penting dalam menunjang pendidikan adalah administrasi dan manajemen. Seperti komponen-komponen pendidikan yang lainnya, administrasi dan manajemen harus dikelola dengan baik, agar kegiatan pendidikan berjalan seperti yang diharapkan.

Administrasi dan manajemen proses yang harus dilakukan sebelum terjadinya proses akuntansi di suatu lembaga. Pelaksanaan administrasi dan manajemen di PPDN sudah mulai berdasakan pada fungsi-fungsinya. Hal ini menjadi kelebihan PPDN yang sudah mengarahkan pelaksanaan administrasi dan manajemen keuangan yang lebih baik. PPDN telah memiliki SOP dan sistem keuangan tersendiri yang berlaku untuk semua Darunnajah beserta cabangnya. Beberapa ada yang menggunakan sistem disentralisasi terkendali sesuai dengan keadaan dan situasi dari pondok pesantrennya. Hal itu dilakukan sangat baik oleh tiap-tiap biro yang ada dipondok pesantren.



6. SEJARAH MANAJEMEN KEUANGAN DI DARUNNAJAH

Manajemen keuangan di Darunnajah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan semakin besar, pemegang dana-pun banyak melibatkan santri, Ustadz/ah sesuai kebijakan semi-desentralisasi yang digunakan.

Sejauh ini, kebijakan Keuangan di Darunnajah pernah mengalami :

No	Tahun	Kebijakan
1	sd 1989	Sentralisasi keuangan perorangan
2	sd 1989	Pembentukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Darunnajah
3	1989	Pembentukan Audit Internal dan mulai menggunakan Eksternal (Akuntan Publik)
4	1989	Penggunaan SPMU Versi 1 (Surat Perintah Mengeluarkan Uang)
5	1996	Sentralisasi Keuangan di TU Keuangan Biro Adm dan Keuangan
6	1990-1999	Sentralisasi Keuangan Darunnajah dipusatkan di BMT 1
7	2000	Semi - Desentralisasi. Terdapat pengambil kebijakan dan otoritas, Isam menyetujui, pencatat dan kasir/pembayar Disepakati; Pimpinan, Direktur, Kepala atau ketua dan sejenitnya sebagai pemegang otoritas yang tidak boleh memegang dana.
8	2000	Setiap dana keluar harus menggunakan SPMU Versi 2 (Surat Perintah Mengeluarkan Uang)
9	2014	Kode Etik keuangan di lingkungan Darunnajah
10	2015	SOP KEUANGAN

Sumber: PPDN (2019)

Gambar 1. Kode Etik dan SOP Keuangan

Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan manajemen keuangan adalah membuat perencanaan keuangan dan anggaran. PPDN menyiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja pondok pesantren (RAPBP). Proses ini, terlebih dahulu dimulai dari pengajuan anggaran oleh masing-masing biro yaitu biro pendidikan, biro pengasuhan, biro administrasi dan keuangan, biro rumah tangga dan biro kemasyarakatan. Dalam proses ini, akan ditentukan tujuan dan standar, aturan dan prosedur, pembuatan rencana serta prediksi apa yang diperkirakan akan dilakukan.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan pimpinan adalah pengawasan untuk mengetahui apakah suatu tujuan dicapai secara efektif dan efisien. Pengawasan juga berguna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pendidikan dan keuangan pesantren. Setiap dana yang keluar harus disetujui pimpinan pesantren dan biro administrasi dan keuangan. Untuk itu, PPDN telah membuat standar prosedur pengeluaran uang, berupa surat perintah mengeluarkan uang (SPMU). Selain itu, setiap pengajuan dana kegiatan harus sudah tercantum terlebih dahulu dalam anggaran.

Setelah kegiatan pengawasan, fungsi manajemen selanjutnya adalah evaluasi yang merupakan kegiatan penilaian apakah kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum. Evaluasi di PPDN dilakukan tidak hanya di akhir kegiatan, tetapi juga pada saat kegiatan dilakukan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur apakah suatu kegiatan telah dilakukan dengan baik dan bisa dilanjutkan. Bila suatu kegiatan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka dijalankan langkah-langkah alternatif selanjutnya agar tidak menghambat kegiatan lainnya.

Pelaksanaan manajemen keuangan di PPDN merupakan suatu usaha pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran di PPDN. PPDN telah mengaplikasikan administrasi dan manajemen yang baik, karena telah sesuai dengan fungsinya yaitu, perencanaan, penyusunan, pergerakan dan pengawasan (Hasyim, 2011). Sejalan dengan Ansan (2016), salah satu strategi rekonstruksi ekonomi pesantren yaitu implemementasi administrasi dan manajemen keuangan, antara lain adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Akuntansi yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas bagi pengguna informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh PPDN ada 2 yaitu *accrual basis* berdasarkan PSAK 45 yang dilakukan auditor internal dan *cash basis* yang dilakukan oleh bagian keuangan pesantren. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada PSAK 45 terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Arus Kas
3. Laporan Aktivitas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

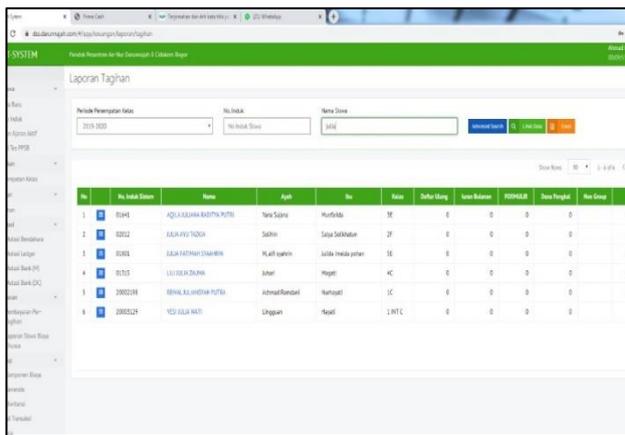
PPDN mempunyai beberapa sumber pemasukan keuangan yaitu berasal dari uang pangkal, SPP, unit usaha, bantuan operasional sekolah dan ada yang bersumber dari infak atau shadaqah dari walisantri atau masyarakat, namun infak atau shadaqah dialokasikan untuk pembangunan asrama ataupun sarana yang lainnya. Sumber pemasukan tersebut dialokasikan untuk investasi pondok seperti bangunan, membeli tanah dll 30%, 35% operasional dialokasikan untuk biaya beban-beban seperti beban listik, air, dan juga untuk kebutuhan santri dan 35% dialokasikan untuk gaji guru dan karyawan.

“Karena kita swasta, jadi ada dua sumber pemasukan dana yaitu dari SPP dan bidang usaha sesuai dengan cita-cita pendiri Darunnajah dibiayai oleh bidang usaha hingga memungkinkan santri tidak terlalu terbebani, pendidikan masih dibiayai SPP sedangkan bidang usaha untuk kesejahteraan dan mengembangkan fasilitas Darunnajah, kadang ada juga dana bantuan dari pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS)” (Ka. Bagian Keuangan PPDN).

Praktik akuntansi pada laporan keuangan di PPDN diinspirasi perintah Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2): 282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan dan transaksi harus dilakukan dengan benar, substansi dari perintah ini adalah praktik pencatatan PPDN harus dilakukan dengan benar, adil dan jujur (Anggraeni, 2011).

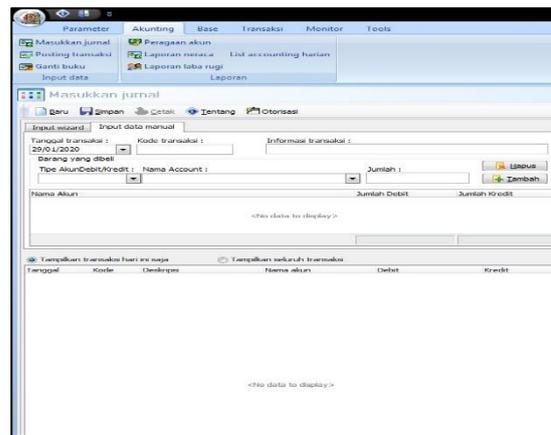
Laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 dibuat oleh auditor internal, sedangkan bagian keuangan pesantren hanya membuat laporan keuangan mutasi kas dengan menggunakan aplikasi *Darunnajah Smart System dan Aplikasi B-Ware*. Bagian keuangan pesantren bukan berasal dari latar belakang akuntansi atau keuangan. Hal

ini yang menjadi kelemahan pesantren dan sejalan dengan penelitian Dwi (2020), bahwa kurangnya sumber daya manusia di pesantren yang memahami ilmu akuntansi menjadi salah satu penyebab penyusunan laporan keuangan pesantren belum sesuai dengan standar yang berlaku.



Sumber: PPDN (2019)

Gambar 2. Darunnajah Smart Sistem (DSS)



Sumber: PPDN (2019)

Gambar 3. Aplikasi B-Ware

Audit internal seharusnya tidak bertugas membuat laporan keuangan, namun hanya fokus pada pemeriksaan secara menyeluruh dan menganalisis pengendalian yang memadai atas bukti transaksi keuangan yang cukup dan relevan. Setelah itu, melaporkan hasil temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan kepada pimpinan pesantren.

Saat ini, pelaksanaan audit internal di PPDN dilakukan setiap bulan di PPDN 1 (Pusat) dan setiap semester di Cabang PPDN. Audit eksternal juga hanya dilakukan pada waktu tertentu, ketika ingin bekerjasama dengan instansi lain atau ketika disyaratkan oleh pihak lain. Proses audit internal diawali dengan memahami SOP yang dijadikan acuan oleh masing-masing pesantren. Terdapat beberapa SOP yang berbeda dari SOP yang telah ditetapkan, tergantung kondisi pesantren. SOP yang harus dipahami bukan hanya SOP keuangan saja, tetapi SOP dari unit usaha yang terdapat di pesantren seperti, *laundry*, koperasi, kantin dan lain-lain. Auditor internal harus paham terkait prosesnya dan darimana pendapatannya berasal serta beban-beban yang ada, lalu membuat laporan keuangan dan dilaporkan ke pimpinan pesantren.

Pelaporan keuangan di PPDN itu memiliki 2 sistem pelaporan keuangan. Pertama, dari masing-masing bagian keuangan pesantren melakukan pelaporan keuangan ke pimpinan pesantren setiap bulan. Kedua, dari bagian keuangan ke internal auditor lalu ke pimpinan dan lanjut melaporkan keuangan pesantrennya setiap 6 bulan kepada yayasan dan dewan nazir. Dalam hal ini, PPDN harusnya memisahkan fungsi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dari fungsi audit internal.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada pimpinan/atasan kerja. Dalam hal ini, akuntabilitas

yang dilakukan PPDN atas aspek keuangan dan penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban oleh masing-masing biro, kemudian diaudit oleh audit internal dan hasilnya akan diserahkan langsung kepada pimpinan pesantren. Temuan audit internal tersebut menjadi bahan evaluasi pimpinan terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Pimpinan pesantren juga membuat laporan pertanggungjawaban untuk diberikan atau dilaporkan kepada yayasan Darunnajah dan dewan nazir. Pimpinan pesantren akan mempertanggungjawabkan semua kegiatan pendidikan, termasuk pelaksanaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan setiap 6 bulan sekali kepada Yayasan Darunnajah. Laporan yang dibuat pimpinan pesantren akan menjadi bahan evaluasi kinerja Pondok Pesantren. Jika ada bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah, maka pesantren melaporkan penggunaan dana tersebut langsung ke pemerintah. Laporan tersebut dibuat oleh setiap unit pendidikan yang menerima dana BOS.

Akuntabilitas yang dilakukan di PPDN adalah akuntabilitas dalam manajemen pendidikan dan pengelolaan dana. Walisantri tidak ikut serta dalam perwujudan sistem akuntabilitas di PPDN, karena memberikan kepercayaan kepada kiyai selaku pimpinan pesantren. Hal tersebut yang membedakan akuntabilitas pesantren dengan lembaga lainnya. Padahal masyarakat dapat juga berperan serta dalam pendidikan, mencakup penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanannya. Pendanaan atau pengelolaan dana harus menjadi tanggung jawab bersama dan dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Wulaningrum, 2011).

PPDN mampu menyusun laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja yang menunjukkan bahwa PPDN telah dikelola secara efisien dan adil, serta dilaporkan secara transparan. Setiap 6 bulan sekali, laporan keuangan dan kegiatan PPDN dievaluasi oleh *stakeholder*. Hal ini sejalan dengan Murdayanti & Puruwita (2019), bahwa pelaksanaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan di pesantren pada umumnya sudah membuat sistem yang baik dan telah dibuat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pimpinan pesantren dan *stakeholder*.

Rasio Pengeluaran

Tabel 1 Presentase Pengeluaran dan Pemasukan (dalam jutaan)

Tahun	2016	2017	2018	2019
Total Pengeluaran	263.056.389	294.623.156	292.855.417	312.447.445
% Kenaikan pengeluaran		12 %	0.6%	6.69%
Total Pemasukan	305.145.412	356.494.019	345.569.392	396.808.259
Perbandingan pemasukan dan pengeluaran	16%	21%	18%	27%
Jumlah Santri	7.589	8.621	8.561	9.210

Sumber: hasil wawancara dan diolah peneliti

Jumlah santri menjadi faktor utama kenaikan penurunan pengeluaran keuangan PPDN. Jika jumlah santri semakin bertambah, maka pemasukan akan bertambah. Selain itu, biaya operasional juga bertambah bertambah, memerlukan

pembangunan gedung asrama dan lainnya. Sebaliknya, jika jumlah santri menurun, maka pemasukan akan menurun dan biaya operasional pesantren juga ikut menurun.

Pengeluaran setiap tahunnya dialokasikan untuk pembangunan, kegiatan pondok dan sekolah, pengembangan ekstrakurikuler dan perpustakaan, kesehatan santri, ujian semester, perlengkapan sekolah (buku dan seragam), perlengkapan tidur, sarana dan prasarana, biaya makan gaji guru.

KESIMPULAN

Administrasi dan manajemen keuangan PPDN sudah cukup baik karena telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan. Jika dilihat dalam aspek akuntansi, PPDN telah menggunakan PSAK 45 pada laporan keuangannya, namun laporan keuangan tersebut dibuat oleh auditor internal dan terpusat di PPDN 1. Bagian keuangan pesantren bukan berasal dari latar belakang akuntansi atau keuangan, sehingga tidak paham terkait laporan keuangan entitas nirlaba. Bagian keuangan hanya bertugas membuat laporan mutasi kas dan bank yang disampaikan kepada pimpinan pesantren. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan kepada *stakeholder* sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai pimpinan, audit internal, Yayasan dan dewan nazir dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Seluruh bagian keuangan PPDN, sebaiknya diberikan pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi atau pedoman yang berlaku. Hal ini berguna untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pesantren, serta agar laporan keuangan mudah dipahami, memiliki relevansi dan dapat dibandingkan. Selain itu, laporan keuangan juga berguna dalam penilaian kinerja pondok pesantren dan menjadi penentu dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. D. (2011). Agency Theory dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 9(2), 1-13.
- Ansan, A. (2016). Strategi rekonstruksi ekonomi pesantren masa depan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah IX Kalimantan*, 14(25), 20-34.
- Beni, A. S., & Yana, S. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Creswell, J. (2016). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depag. (2013). *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dwi, S. (2020). Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. *AKTSAR Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 31-48. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198>
- Harits, M. (2014). *Sejarah Darunnajah*. Jakarta. Retrieved from www.Darunnajah.Com
- Hasyim. (2011). *Manajemen Syariah*. Jakarta: Universitas Mercu Buana.

- Kemenag. (2019). Jumlah Pesantren di Indonesia. Jakarta. Retrieved from <http://ditpdpotren.kemenag.go.id>
- Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2018). Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern. *Sosietas*, 7(1), 346–352. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10348>
- Murdayanti, Y., & Puruwita, D. (2017). Transparency and accountability of financial management in pesantren (Islamic Education Institution). *Advanced Science Letters*, 23(11), 10721–10725. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.10138>
- Murdayanti, Y., & Puruwita, D. (2019). Kompetensi SDM Keuangan dan Akuntabilitas Pesantren. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 19–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1085>
- Purwita, D., & Murdayanti, Y. (2019). Measuring Financial Management in Islamic Educational Institutions in Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahmidi, H. (2011). *Manajemen Keuangan: Konsep, Teori dan Praktiknya di Sekolah dan Pondok Pesantren*. Purwokerto: STAIN Press.
- Rusdiyanto. (2016). Penerapan PSAK 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang Pragan Sumenep Madura Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 5(1), 66–74.b
- Subkhan. (2012). Peranan Kyai Dalam Manajemen Pembiayaan di Pondok Pesantren Asma'Chusna Kranji. *Journal of Economic Education*, 1(1), 78–83.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuningsih, Karamoy, H., & Afandy, D. (2018). Analisis Pelaporan Keuangan Di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan Psak 45 Dan Psak 101). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19675.2018>
- Wulaningrum, R. (2011). Partisipasi Pegawai dalam Penyusunan Anggaran Samarinda. *Jurnal EKSIS*, 7(2), 1874–1883.
- Yanuar, F. (2018). Kajian Literatur Implementasi Pedoman Akuntansi. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam 1 (1)*, 1–16.
- Zulkifli, K., Wardoyo, C., & Andayani, E. S. (2018). Financial Management Accountability in Islamic Perspective (Phenomenological Study In Islamic Boarding School Nurul Hidayah). *International Journal of Business, Economics and Law*, 15(5), 149–154.